

IMPLEMENTASI PROGRAM STIMULAN JAMBAN SEHAT DI KALURAHAN SEMANU, KAPANEWON SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL: STUDI KEBIJAKAN DAN DAMPAKNYA

Friska Fara Eka Haryani¹, Djuniawan Karna Djaja², Samsuharjo³
Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas Gunung Kidul, Indonesia

haryanifara@gmail.com, dkarnadjaja@ugk.ac.id

samsuharjo2018@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Healthy Latrines Stimulant Program policy in Semanu Village, Semanu Subdistrict, Gunungkidul Regency, and to identify the impacts and obstacles encountered in its implementation. The research method used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Research informants included village officials, the Village Community Empowerment Institution (LPMK), and aid recipients. The results show that this program improves sanitation access for low-income communities, reduces open defecation practices, and encourages clean living behaviors. However, its implementation is still hampered by budget constraints, low community participation, and suboptimal communication effectiveness. In conclusion, although the program has had a positive impact on health and environmental cleanliness, strengthening coordination between stakeholders and community participation strategies is needed to support the program's sustainability.

Keywords: Policy Implementation, Healthy Toilets, Stimulant Program, Semanu Village, Sanitation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Stimulan Jamban Sehat di Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, serta mengidentifikasi dampak dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi perangkat kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), dan penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menurunkan praktik buang air besar sembarangan, dan mendorong perilaku hidup bersih. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang rendah, serta efektivitas komunikasi yang belum optimal. Kesimpulannya, meskipun program berdampak positif terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan, diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan strategi partisipasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, jamban Sehat, Program Stimulan, Kalurahan Semanu, Sanitasi

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Kesehatan lingkungan memiliki peran vital dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Salah satu aspek terpenting dalam kesehatan lingkungan adalah sanitasi yang layak, karena secara langsung berpengaruh terhadap pencegahan penyakit menular, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, persoalan sanitasi masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) akibat minimnya kepemilikan jamban sehat tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit seperti diare, infeksi saluran pencernaan, dan stunting. Kondisi ini semakin diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (2023), sekitar 20% rumah tangga di Kalurahan Semanu belum memiliki akses terhadap jamban sehat, meskipun program intervensi telah berjalan beberapa tahun terakhir. Padahal, keberadaan fasilitas sanitasi yang layak menjadi indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Program Stimulan Jamban Sehat, yaitu program bantuan material dan pendampingan untuk pembangunan jamban sehat bagi keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan dapat mengurangi praktik BABS, meningkatkan akses sanitasi, dan mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat.

Efektivitas implementasi program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung seperti kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan tingkat partisipasi masyarakat. Di lapangan, masih dijumpai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya keterlibatan warga, dan koordinasi lintas pihak yang belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Stimulan Jamban Sehat di Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, mengidentifikasi dampak yang dihasilkan, serta memetakan hambatan yang dihadapi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menyusun strategi peningkatan sanitasi di wilayah pedesaan, sekaligus memperkaya literatur akademik di bidang implementasi kebijakan kesehatan lingkungan.

2. Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui tindakan maupun ketidak bertindakan (Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip oleh Miftah Toha (2008: 107)). Implementasi kebijakan menjadi tahap strategis dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap ini substansi kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan konkret yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan prosedur (Grindle, 1980). Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, komunikasi yang efektif, serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

Model implementasi Edward III menekankan empat variabel kunci, yaitu: (1) komunikasi, mencakup transmisi informasi, kejelasan, dan konsistensi; (2) sumber daya, meliputi SDM, kewenangan, informasi, serta sarana prasarana; (3) disposisi, yaitu kemauan pelaksana untuk menjalankan kebijakan; dan (4) struktur birokrasi, termasuk standar operasional prosedur (SOP) dan koordinasi antar lembaga (Widodo, 2010).

Sanitasi dan Jamban Sehat

Sanitasi diartikan sebagai upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi lingkungan yang sehat melalui pengelolaan limbah manusia dan pencegahan pencemaran (WHO, 2021). Jamban sehat merupakan fasilitas sanitasi dasar yang memenuhi persyaratan teknis seperti tidak mencemari sumber air, bebas bau, aman digunakan, dan mudah dibersihkan (Kemenkes RI, 2017). Kepemilikan jamban sehat berkontribusi langsung pada pencegahan penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan infeksi parasit usus (Azzarrah & Kurniawan, 2021).

Program Stimulan Jamban Sehat

Program Stimulan Jamban Sehat di Kabupaten Gunungkidul merupakan kebijakan daerah yang bertujuan mempercepat peningkatan akses sanitasi layak, terutama bagi keluarga miskin. Bentuk stimulan yang diberikan umumnya berupa bantuan material dan pendampingan teknis untuk pembangunan jamban sehat. Program ini sejalan dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan perilaku hidup bersih (Permenkes No. 3 Tahun 2014).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memiliki karakteristik mengungkap suatu fenomena sesuai dengan kondisi nyata atau alami (*natural setting*), tanpa melakukan perubahan menjadi bentuk simbol atau angka.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis, yaitu pendekatan yang berfokus pada aspek subjektif dan perilaku individu, dengan berupaya memahami dunia konseptual subjek penelitian sehingga dapat mengetahui apa dan bagaimana suatu makna terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder (Riyadi & R, 2021).

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2011).

Triangulasi data untuk menguji keabsahan dari data yang didapatkan dari lapangan. Triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan menerapkan berbagai cara dan berbagai rentan waktu (Sugiyono 2017) dalam (Mekarisce, 2020).

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum, selama, hingga setelah pengumpulan data dengan fokus di lapangan. Prosesnya berlangsung interaktif hingga data jenuh melalui tiga tahap: reduksi data untuk menyaring dan merangkum informasi penting, penyajian data dalam berbagai bentuk visual atau naratif, serta penarikan kesimpulan yang menghasilkan temuan baru dan dapat berkembang selama penelitian. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Peneliti juga akan meminta umpan balik dari partisipan terhadap temuan awal guna memastikan interpretasi yang dibuat selaras dengan kondisi nyata. Melalui langkah ini, diharapkan penelitian mampu menyajikan gambaran yang tepat dan akurat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, implementasi Program Stimulan Jamban Sehat di Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, terbukti memberikan kontribusi signifikan

terhadap peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah. Program ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan material pembangunan jamban sehat kepada keluarga penerima manfaat yang telah melalui proses verifikasi kelayakan oleh pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK). Sebagian besar penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat yang selama ini belum memiliki fasilitas sanitasi memadai, sehingga keberadaan program menjadi solusi penting dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dampak positif dari program ini dapat diamati dalam beberapa aspek. Pertama, terjadi penurunan signifikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sejumlah RT, yang sebelumnya menjadi masalah kesehatan lingkungan yang cukup serius. Kedua, masyarakat melaporkan peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam aktivitas sehari-hari, karena telah memiliki fasilitas sanitasi yang layak, bersih, dan mudah diakses. Ketiga, kebersihan lingkungan rumah tangga meningkat secara nyata, sehingga risiko penyebaran penyakit berbasis air, seperti diare dan infeksi saluran pencernaan, dapat ditekan. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk rasa percaya diri dan martabat keluarga penerima manfaat.

Program ini juga berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kesadaran untuk menjaga kebersihan jamban, memastikan ketersediaan air bersih, serta mengedukasi anggota keluarga terutama anak-anak tentang pentingnya menjaga sanitasi lingkungan mulai tumbuh di kalangan penerima manfaat. Beberapa keluarga bahkan menginisiasi perbaikan tambahan pada fasilitas jamban mereka secara swadaya untuk memastikan kenyamanan dan kebersihan terjaga.

Penelitian juga menemukan adanya kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaan program. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan jumlah penerima bantuan setiap tahunnya terbatas, sehingga masih ada keluarga yang memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perawatan fasilitas juga belum merata, karena sebagian warga masih menganggap program ini sebagai bantuan sepenuhnya dari pemerintah tanpa adanya tanggung jawab pemeliharaan. Selain itu, terdapat kesenjangan komunikasi dan koordinasi antara pelaksana program dengan masyarakat, yang berdampak pada pemahaman yang kurang seragam terkait tujuan, manfaat, dan mekanisme program.

4.2 Pembahasan

Teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi

- Komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Program Stimulan Jamban Sehat dilakukan melalui pertemuan warga, forum musyawarah desa, serta koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) sebagai mitra strategis pemerintah desa. Media komunikasi yang digunakan meliputi penyampaian langsung secara tatap muka, informasi dari perangkat desa, dan penyebaran pengumuman di balai desa. Meskipun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program masih bervariasi. Sebagian warga memahami program sebagai Upaya pemerintah untuk mengubah perilaku sanitasi dan meningkatkan kesehatan lingkungan, tetapi sebagian lainnya hanya memandangnya sebagai bantuan fisik untuk membangun jamban tanpa memahamii pentingnya perawatan dan perubahan perilaku hidup bersih. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi kejelasan, konsistensi, dan

kelengkapan informasi belum sepenuhnya tercapai, sehingga masih dibutuhkan penguatan strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan partisipatif.

- Sumber Daya, pelaksana program, yang terdiri dari perangkat desa, tim pelaksana kegiatan, dan pengurus LPMK, menunjukkan komitmen yang cukup tinggi untuk memastikan kelancaran program. Mereka terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan, distribusi material, hingga pendampingan pembangunan di rumah penerima manfaat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia terampil, minimnya sarana pendukung seperti alat konstruksi yang memadai, dan terbatasnya alokasi anggaran menjadi faktor penghambat yang cukup dominan. Kondisi ini menyebabkan jangkauan program menjadi terbatas dan tidak mampu menjangkau seluruh rumah tangga yang membutuhkan jamban sehat. Selain itu, keterbatasan finansial juga memengaruhi kualitas material dan kecepatan pelaksanaan di lapangan.
- Disposisi Pelaksana, penelitian menemukan bahwa sikap dan komitmen pelaksana terhadap keberhasilan program tergolong positif. Para pelaksana memiliki kemauan untuk turun langsung ke lapangan, memberikan arahan teknis kepada penerima manfaat, dan memastikan pembangunan sesuai standar jamban sehat. Namun, sistem insentif dan penghargaan bagi pelaksana belum dikelola secara optimal, sehingga ada risiko menurunnya motivasi apabila tidak ada dukungan moral dan material yang memadai dari pemerintah maupun masyarakat.
- Struktur Birokrasi, pelaksanaan program di Kalurahan Semanu telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun berdasarkan pedoman dari pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan. Mekanisme pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa bersama LPMK, termasuk pengecekan kualitas pembangunan dan pelaporan perkembangan program. Meski demikian, koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, LPMK, dan Dinas Kesehatan, masih perlu diperkuat. Beberapa kendala teknis di lapangan, seperti keterlambatan distribusi material atau perbaikan konstruksi yang tidak sesuai standar, memerlukan respons cepat, namun terkadang terhambat oleh jalur koordinasi yang panjang dan prosedural.

Dampak positif program dapat dilihat dari meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki jamban sehat sesuai kriteria kesehatan, berkurangnya angka praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta mulai tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Program ini juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan aman dari risiko penularan penyakit berbasis air. Namun demikian, tantangan keberlanjutan program masih cukup besar. Keterbatasan pembiayaan menjadi isu utama, karena tanpa dukungan anggaran lanjutan, program sulit menjangkau keluarga yang belum tersentuh bantuan. Selain itu, terdapat potensi penurunan motivasi masyarakat dalam merawat fasilitas yang telah dibangun, terutama jika tidak ada mekanisme pendampingan pasca program.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi terpadu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, lembaga masyarakat, sektor swasta, hingga lembaga donor, untuk memastikan keberlanjutan program. Strategi ini dapat mencakup penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran dan kemandirian dalam membangun serta merawat fasilitas sanitasi; peningkatan kapasitas teknis pelaksana melalui pelatihan

berkala; serta pengembangan skema kemitraan lintas sektor untuk mendukung pembiayaan dan pendampingan teknis. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan manfaat program tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi mampu bertahan dan terus berkembang, sehingga Kalurahan Semanu dapat mencapai kondisi bebas BABS dan memiliki lingkungan yang sehat secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Implementasi Program Stimulan Jamban Sehat di Kalurahan Semanu terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan akses sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini berhasil mengurangi praktik buang air besar sembarangan, sekaligus mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat. Dampak positif tersebut tidak hanya terlihat pada aspek kesehatan lingkungan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi layak. Namun demikian, pelaksanaan program masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan strategi, peningkatan sinergi antar pihak, serta keterlibatan aktif masyarakat agar manfaat program dapat terjaga dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- [2] Azzarrah, I. J., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Di Jawa Timur. *Publika*, 573-586. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p573-586>
- [3] Djaja, D. K., Elfina, H., Najdah, N., Razai, G., Munip, A., & Muhammadong, M. (2023). Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Di Universitas. *Review Pendidikan Dan Pegajaran*, 6(2), 270-278.
- [4] Indonesia, R. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014*.
- [5] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2017). *Buku Pedoman Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.
- [6] Magfirah, A. A., Muslima, L., & Sabdi, M. (2021). Hubungan Sanitasi Rumah Dengan Kejadian Penyakit Common Cold Di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 13(3), 121-125. <https://doi.org/10.52022/jikm.v13i3.227>
- [7] Pemerintah Desa Semanu. (N.D.). *Jambanisasi PIWK 2019 terselesaikan*. Desa Semanu. Diakses Pada 3 Maret 2025, Dari <https://desasemanu.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/381-JAMBANISASI-PIWK-2019-TERSELESAIKAN>
- [8] Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. (2023). *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 36 Tahun 2023*.
- [9] Riyadi, S., & R, S. (2021). Advokasi Perilaku Penggunaan Jamban Sehat Melalui Pendekatan Spiritual Dan Kultural Di Situbondo. *Jurnal Abdimas Madani*, 3(2), 29-35. <https://abdiasmadani.ac.id/index.php/abdimas/article/view/48>
- [10] Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- [11] Widia Astuti AW, Fitria Hari Wibawati, Rani Devayanti. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang PHBS Dengan Penggunaan Jamban Sehat. *Jurnal Ilmiah Wijaya* Volume 12 Nomor 1, 47-55
- [12] Zahara, A., Nirzalin, N., & Bin Abubakar, M. (2021). Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 1.

<https://doi.org/10.29103/Jtp.V1i1.5727>